SKRIPSI PENELITIAN

FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGELOLAAN LAHAN PARKIR DI DERMAGA DESA JONGKONG KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

Sari Nurhidayati
NIM. E1032211002

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

SKRIPSI

FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGELOLAAN LAHAN PARKIR DI DERMAGA DESA JONGKONG KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

Sari Nurhidayati
NIM. E1032211002

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

LEMBAR PERSETUJUAN

FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGELOLAAN LAHAN PARKIR DI DERMAGA DESA JONGKONG KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Sari Nurhidayati
NIM. E1032211002

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. Martovo, MA
NIP. 196010031986031004

Tanggal: 08/05 2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Dr. Yulius Yohanes, M.Si
NIP. 196405271992021001

Tanggal: 07/05 2025

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGELOLAAN LAHAN PARKIR DI DERMAGA DESA JONGKONG KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

Oleh:

Sari Nurhidayati
Nim. E1032211002

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Selasa/22 April 2025
Waktu : 10:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. H. Marlovo. M.A.
NIP. 196010031986031004

Sekretaris

Dr. Yulius Yohanes. M.Si.
NIP. 196405271992021001

Penguji Utama

Drs. Sukamto. M.Si.
NIP. 196010081987031002

Penguji Pendamping

Bima Sujendra. S.IP., M.Si.
NIP. 198805072014041002

Disahkan Oleh
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan. S. Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Sari Nurhidayati, Fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Lahan Parkir di Dermga Desa Jongkong Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan lahan parkir yang efektif terhadap kondisi keterbatasan lahan di dermaga Desa Jongkong Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif sebagai teknik pengumpulan data dan wawancara langsung kepada informan seperti Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Angkutan, Sungai, Danau, dan Penyebrangan, Unit Pelaksana Teknis, serta masyarakat yang merasakan dampak kemacetan akibat kepadatan parkir kendaraan di dermaga desa Jongkong. Penelitian ini menggunakan teori Taliziduhu Ndraha (2011) tentang fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yaitu Perencanaan Pemerintahan, Pengorganisasian Sumber-Sumber Pemerintahan, Penggunaan Sumber-Sumber Pemerintahan, dan Kontrol Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Dinas Perhubungan dalam mengelola lahan parkir di dermaga desa Jongkong masih belum optimal. Pertama, perencanaan yang kurang efektif karena hanya dapat mengatasi masalah keterbatasan lahan sementara. Kedua, tugas yang tumpang beban kerja berlebih pada Unit Pelaksana Teknis. Ketiga, kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas terkait operasional dermaga dan kurangnya sumber daya material seperti portal masuk lahan parkir sebagai alat pendukung operasional. Dan keempat, kurangnya pemahaman dan penyediaan solusi alternatif terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal ini yaitu keterbatasan lahan parkir

Kata Kunci : Fungsi, Dinas Perhubungan, Pengelolaan.

ABSTRACT

Sari Nurhidayati, Function of the Transport Agency in the Management of Parking Lots Parking in Dermga, Jongkong Village, Jongkong District, Kapuas Hulu Regency. Hulu. Thesis. Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, Tanjungpura University. 2025.

This study aims to determine and analyse the function of the Transportation Agency in effective parking management of the limited land conditions at the Jongkong Village pier, Jongkong District, Kapuas Hulu Regency. The method used in this research is a qualitative method as a data collection technique and direct interviews with informants such as the Head of the Transportation Agency, Head of Transport, Rivers, Lakes and Crossings, Technical Implementation Units, and people who feel the impact of congestion due to the density of vehicle parking at the Jongkong village pier. This research uses Taliziduhu Ndraha's (2011) theory of government management functions, namely Government Planning, Organising Government Resources, Using Government Resources, and Controlling Government. The results showed that the function of the Transportation Agency in managing the parking lot at the Jongkong village pier is still not optimal. First, planning is less effective because it can only overcome the problem of temporary land limitations. Second, overlapping workloads in the Technical Implementation Unit. Third, the lack of human resources in carrying out tasks related to dock operations and the lack of material resources such as parking lot entry portals as operational support tools. And fourth, the lack of understanding and provision of alternative solutions to the problems faced by the community in this case, namely the limited parking space.

Keyword : Function, Transport Agency, Management.

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Lahan Parkir di Dermaga Desa Jongkong Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu” berdasarkan dari suatu masalah terkait dengan pengelolaan lahan parkir di dermaga desa Jongkong yang kompleks, terutama terkait dengan fungsi Dinas Perhubungan. Hal ini terlihat dari kepadatan parkir kendaraan dan kemacetan yang terjadi yang disebabkan oleh banyaknya kendaraan mobil pribadi masyarakat sekitar yang memarkirkan kendaraannya di area parkir dermaga. Hal ini mengakibatkan kurangnya lahan parkir untuk kendaraan truk angkutan barang sehingga sopir truk angkutan barang memilih memarkirkan kendaraannya di tepi jalan di sekitar dermaga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Dinas Perhubungan dalam mengelola lahan parkir terhadap keterbatasan lahan di dermaga desa Jongkong, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan lahan parkir yang efektif terhadap kondisi keterbatasan lahan di dermaga desa Jongkong, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna di balik fenomena atau peristiwa sosial. Teknik yang digunakan dalam mengumpulan data di penelitian ini menggunakan teknik

wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi yang di dukung dengan alat pengumpulan data berupa panduan wawancara dan alat komunikasi.

Berdasarkan teori fungsi-fungsi manajemen pemerintahan menurut Taliziduhu Ndraha. Ndraha memandang bahwa manajemen pemerintahan melibatkan serangkaian fungsi dasar yang saling terkait dengan untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsi tersebut meliputi :

Perencanaan pemerintahan, perencanaan merupakan proses untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan cara menetapkan tujuan dengan menganalisis situasi, merumuskan strategi, dan menetapkan langkah yang perlu diambil. Dinas Perhubungan melaksanakan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Perencanaan yang dilakukan adalah membuat rencana jangka panjang dan jangka pendek dalam mengatasi keterbatasan lahan parkir yang menyebabkan kepadatan parkir kendaraan di dermaga desa Jongkong.

Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, pemerintah menata dan mengelompokkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan. Dalam melaksanakan fungsinya, Dinas Perhubungan melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab, serta penetapan mekanisme koordinasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021. Tujuannya untuk menghindari tumpang tindih tugas dan memudahkan akses informasi, sehingga Dinas Perhubungan dapat memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Penggunaan sumber-sumber pemerintahan, pemerintah mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan untuk mencapai hasil yang maksimal, sehingga pemerintah harus mampu mengatur sumber daya dengan baik agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam mengelola lahan parkir di dermaga desa Jongkong, Dinas Perhubungan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya yang digunakan adalah sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya material, dan sumber daya informasi.

Kontrol Pemerintahan, pemerintah melakukan penagawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap semua kegiatan pemerintahan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan. Dinas Perhubungan melakukan perencanaan terkait pengelolaan lahan parkir di dermaga desa Jongkong dan melakukan pengawasan terhadap kondisi di lapangan. Hal ini untuk memastikan kontrol pemerintahan yang efektif dalam membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan mencapai tujuan pembangunan.

Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan lahan parkir sangat penting dalam menciptakan lingkungan parkir yang tertib, aman, dan efisien. Penelitian ini menyoroti hambatan dalam pengelolaan lahan parkir di dermaga desa Jongkong seperti kurangnya pemahaman terhadap peraturan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya penegakan hukum. Lebih lanjut, penelitian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan lahan parkir terhadap kondisi keterbatasan lahan tidak hanya bergantung pada tindakan teknis, tetapi juga pada kemampuan Dinas

Perhubungan dalam merespons dinamika kebutuhan parkir dan menegakkan aturan secara konsisten. Penelitian ini memberikan saran kepada Dinas Perhubungan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan parkir, meningkatkan koordinasi, meningkatkan fasilitias dan sumber daya manusia, menegakkan aturan, serta mengembangkan alternatif lahan parkir. Pengelolaan lahan parkir yang efektif terhadap kondisi keterbatasan lahan memerlukan evaluasi berkelanjutan dan adaptasi kebijakan untuk mengatasi tantangan di masa depan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sari Nurhidayati

NIM : E1032211008

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 15 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Sari Nurhidayati

NIM. E1032211002

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

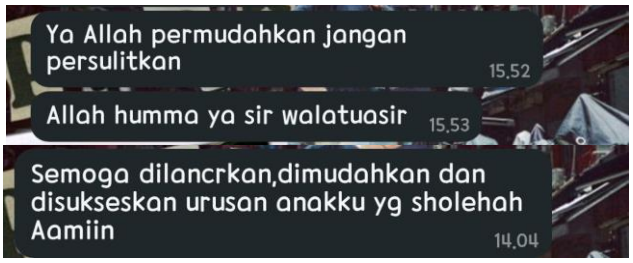
MOTTO :

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku"

-Umar Bin Khattab-

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

Q.S Al-Insyirah : 5



Sumber : Chat Whatsapp 11 November 2024 "Mamak"

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK :

1. Allah SWT, atas pertolongan-Mu kepada hamba yang tidak berdaya tanpa mukjizat-Mu. Terima kasih telah memberikan hamba kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan salah satu babak dalam kehidupan ini.
2. Kepada kedua orang tua saya **Bapak Sarjo** (Alm) dan **Ibu Ratnayati** yang selalu saya doakan dimanapun dan kapanpun. Untuk ibu saya yang sangat saya cintai, yang sudah mendidik dan membimbing saya sebagai orang tua tunggal, terima kasih selalu saya ucapkan pada orang yang menjadi tumpuan hidup saya selama ini. Terima kasih sudah selalu berjuang terhadap

kehidupan saya, terima kasih sudah selalu memberikan dukungan dan doa tulusnya pada saya agar dilancarkan dan dipermudah dalam menyelesaikan skripsi, dan terima kasih sudah menjadi orang tua paling hebat bagi anakmu ini. Maafkan saya yang belum bisa memberikan hasil yang sesuai dengan ekspektasi mu selama ini, tetapi saya yakin saya sudah melakukan yang terbaik di setiap usaha saya.

Untuk ayah saya yang sudah lebih dulu mendahului kami, semoga apa yang anak mu lakukan di dunia saat ini tidak memberatkanmu di akhirat sana, semoga segala perbuatan baik ayah selama ayah hidup dapat menjadi amal yang dapat membantu meringankan beban ayah disana, dan semoga ayah ditempatkan ditempat terbaik di sisi-Nya.

3. Kepada kakak-kakak saya **Kartika Maya Sari** dan **Sari Wulandari**, yang selalu menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih kepada mereka yang selalu memberikan dukungan, masukan dan arahan kepada adik bungsu kalian ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada kakak pertama saya yang memberikan semangat dan perhatiannya selama saya menyusun skripsi, walaupun tidak kakak lakukan dalam bentuk kata-kata, tapi kakak lakukan dalam bentuk tindakan. Untuk kakak kedua saya, yang selalu memberi arahan dan dukungan selama saya menyusun skripsi, baik itu tindakan maupun perkataan, terima kasih selalu mengerti dan memberi semangat pada adik bungsu mu ini. Terima kasih sekali lagi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahkan rahmat, kemudahan, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini berjudul "Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Lahan Parkir Di Dermaga Desa Jongkong Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu"

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari segi materi maupun Teknik penyajian. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada peneliti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Herlan, S. Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Prof. Dr. H. Martoyo, M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Drs. Sukamto, M.Si selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bima Sujendra, S.IP., M.Si selaku Dosen Penguji Pendamping yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saya motivasi, saran, dan masukan selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu beserta jajarannya yang telah memberikan data dan informasi dalam penulisan Skripsi ini.
9. Kepada sahabat saya selama di perkuliahan, Yohana Linda, Puput Decawati, Putri Qatrunnada Rahadatul Aisy, Salsha Billa, dan Ferry Sepriyadi Effendi. Terima kasih atas bantuan, masukan, dan dukungan kalian, saya dapat sampai ke tahap menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua hal yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kalian selalu sehat dimanapun dan kapanpun.
10. Kepada kedua sahabat saya yang juga selalu mendukung saya, Noviana Widya Safitri dan Elsa Ranita Wijaya. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu menemani begadang dalam mengerjakan tugas, tempat bercerita, mendukung dan memotivasi saya selama di perkuliahan ini. Dimanapun kalian semoga selalu dilancarkan dan dimudahkan serta tercapai apa yang selalu di semogakan.
11. Kepada sahabat-sahabat saya yang sudah menemani, memberikan motivasi dan masukan, serta dukungan pada saya selama ini, Dien Permata Mulia Tsani, Nova Erlangga, Ratu Maharani, Indah Sertia Sari, Juliana, Maharani, Dzulfa Salshabila, Muthia Maghfira, dan Aulia Asmarani yang sudah menemani saya

di kala sedih dan senang, menjadi tempat bercerita, dan orang-orang yang saling menguatkan, terima kasih sekali lagi. Semoga persahabatan kita sampai ke surganya Allah.

12. Kepada sahabat saya Ismi Rahmiyati, walaupun tidak ada kontribusi sama sekali di skripsi ini tetapi terima kasih sudah menjadi sahabat saya dari kecil sampai saat ini, tempat bercerita tentang hari-hari yang dijalani dan sebagai keluarga tidak sedarah yang selalu menemani di kala suka dan duka saya. Dimanapun dan kapanpun semoga selalu dalam lindungan-Nya, dimudahkan segala urusan dan permasalahannya, dan semoga selalu menjadi sahabat *till jannah*.
13. Terima kasih kepada EXO dan Seventeen yang selalu menjadi penghibur saya dikala lelah dan suntuk dengan kehidupan, semoga bisa di *notice* walaupun hanya di *social media*.
14. Kepada orang-orang yang selalu bertanya “kapan skripsimu selesai?” dan “kapan kamu wisuda?”. Wisuda hanyalah bentuk seremonial akhir setelah melewati beberapa proses. Setiap proses yang dijalani tidak semudah menanyakan kalimat yang menjadi tolak ukur kepintaran seseorang. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan, entah itu tepat waktu, maupun tidak.
15. Kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah selalu bertahan dan berjuang selama ini, terima kasih sudah sekuat dan setegar ini, terima kasih atas semua usaha yang sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Semoga selalu dapat menatap ke depan dan melewati setiap jalan kehidupan yang ada. Terima kasih.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Skripsi ini. Untuk ini peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Skripsi ini sehingga mampu memberikan sumbangsih bagi studi penelitian dan bermanfaat bagi yang membacanya.

Pontianak, 4 Maret 2025

Sari Nurhidayati

NIM. E1032211002

DAFTAR ISI

halaman

LEMBAR PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
RINGKASAN SKRIPSI vii
PERNYATAAN KEASLIAN xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN xii
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xviii
DAFTAR TABEL xxi
DAFTAR GAMBAR xxii
DAFTAR LAMPIRAN xxiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah **1**
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian **12**
1.3. Fokus Masalah **13**
1.4. Rumusan Masalah **13**
1.5. Tujuan Penelitian **13**
1.6. Manfaat Penelitian **13**
1.6.1. Manfaat Teoritis 13
1.6.2. Manfaat Praktis 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16
2.1. Konsep **16**
2.1.1. Fungsi 16
2.1.2. Manajemen (Pengelolaan) 16
2.1.3. Parkir 18
2.1.4. Kemacetan 19
2.1.5. Dermaga 21
2.1.6. Dinas Perhubungan 22

2.2. Teori Fungsi Manajemen Pemerintahan **24**
2.3. Penelitian Relevan **26**
2.4. Alur Pikir Penelitian **28**
2.5. Pertanyaan Penelitian **33**
BAB III METODE PENELITIAN **34**
3.1. Jenis Penelitian **34**
3.2. Langkah-Langkah Penelitian **35**
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian **36**
3.3.1. Tempat Penelitian 36
3.3.2. Waktu Penelitian 36
3.4. Subyek dan Obyek Penelitian **37**
3.4.1. Subjek Penelitian 37
3.4.2. Objek Penelitian 38
3.5. Teknik Pengumpulan Data **38**
3.6. Instrumen Pengumpulan Data **39**
3.7. Analisis Data **40**
3.7.1. Teknik Analisis Data 41
3.7.2. Uji Keabsahan Data 42
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DESA JONGKONG KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU **44**
4.1. Sejarah Wilayah Desa Jongkong **44**
4.2. Demografi **45**
4.3. Keadaan Penduduk **46**
4.4. Gambaran Umum Dermaga Desa Jongkong **47**
4.5. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kapuas Hulu **49**
4.6. Struktur Kepengurusan Dinas Perhubungan Kapuas Hulu **53**
BAB V PEMBAHASAN **68**
5.1. Deskripsi Peneliti **68**
5.2. Analisis **74**

5.2.1. Perencanaan Pemerintahan Terkait Fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Lahan Parkir di Dermaga Desa Jongkong Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu 74
5.2.2. Pengorganisasian Sumber-Sumber Pemerintahan Terkait Fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Lahan Parkir di Dermaga Desa Jongkong Kecamatan Jongkong Kabupaaten Kapuas Hulu 83
5.2.3. Penggunaan Sumber-Sumber Pemerintahan Terkait Fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Lahan Parkir di Dermaga Desa Jongkong Kecamatan Jongkong Kabupaaten Kapuas Hulu... 90
5.2.4. Kontrol Pemerintahan Terkait Fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Lahan Parkir di Dermaga Desa Jongkong Kecamatan Jongkong Kabupaaten Kapuas Hulu 97
BAB VI PENUTUP 104
6.1. Kesimpulan **..... 104**
6.2. Saran **..... 108**
DAFTAR PUSTAKA 111
LAMPIRAN 114

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

1.1. Tarif Retribusi Kendaraan.....10

3.1. Waktu Penelitian.....36

4.1. Batas Administrasi Kecamatan Jongkong.....46

5.1. Laporan Pendapatan Retribusi Parkir di Dermaga Desa Jongkong 93

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

1.1. Kendaraan Pribadi Masyarakat di Parkiran Dermaga.....5

1.2. Tabel Perkembangan SITU/SIUP di Kecamatan Jongkong.....7

2.1. Alur Pikir Penelitian.....32

4.1. Peta Desa Jongkong.....45

4.2. Parkir Dermaga Area Darat.....48

4.3. Parkir Dermaga Area Air.....48

4.4. Dermaga Desa Jongkong.....49

4.5. Bagan Susunan Kepengurusan Dinas Perhubungan Kapuas Hulu.....58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

1. Pedoman Wawancara.....114
2. Pedoman Observasi.....118
3. Dokumentasi Penelitian.....120
4. Daftar Riwayat Hidup.....123
5. Lokasi Penelitian.....124
6. Dermaga Desa Jongkong.....125
7. Karcis Retribusi Parkir.....126
8. Surat Tugas Penelitian.....127
9. Surat Persetujuan Hibah Dermaga.....128

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih melakukan pembangunan di berbagai sektor, baik sektor sosial, ekonomi, dan umum. Pada dasarnya pembangunan diperuntukkan pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan di Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan keterbatasan lahan. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan penyediaan lahan parkir menyebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Dalam rangka mendukung mobilitas yang efektif, pembangunan infrastruktur parkir harus menjadi prioritas utama.

Penyediaan lahan parkir yang memadai merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam perencanaan tata ruang. Ketersediaan lahan parkir yang memadai dapat meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dalam kenyamanan beraktifitas, dan perkembangan suatu wilayah. Lahan parkir yang memadai juga dapat mengurangi *volume* kendaraan yang parkir di bahu jalan atau area dilarang parkir yang akhirnya menyebabkan kemacetan sehingga fasilitas parkir yang disediakan harus mencukupi kebutuhan masyarakat.

Menurut Walean (et al., 2019) banyak kerugian yang ditimbulkan dari kemacetan, baik dari segi materi, waktu, dan tenaga. Seperti aspek ekonomi yang terhambat karena proses produksi dan distribusi sehingga laju perekonomian terganggu. Begitu pula dari aspek kesehatan yang menimbulkan dampak negatif pada kondisi fisik dan psikis para pengguna lalu lintas maupun pengguna jalan.

Menurut G.R Terry (dalam Hasibuan, 2016, 3) menyatakan bahwa manajemen atau pengelolaan merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Manulang (2016, 5) juga menyatakan manajemen (pengelolaan) adalah proses yang terdiri dari pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks yang lebih luas, pengelolaan mencakup serangkaian kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Pengelolaan lahan parkir merupakan aspek penting dalam manajemen transportasi yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam penggunaan ruang publik. Hal ini melibatkan berbagai kegiatan, seperti penataan tata letak parkir, pengaturan arus lalu lintas, penegakan aturan parkir, dan pengelolaan retribusi. Dengan pengelolaan yang baik, sumber daya dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan kepada semua pihak untuk turut serta mematuhi lalu lintas pada saat berkendara di wilayah jalan publik. Lalu lintas mengacu pada aktivitas

apa pun yang dilakukan dengan kendaraan sehubungan dengan undang-undang lalu lintas yang harus dipatuhi.

Dinas Perhubungan memiliki kewenangan otoritas dalam menjalankan fungsinya. Dinas Perhubungan merupakan lembaga yang menjalankan tugas berdasarkan asas desentralisasi. Desentralisasi merupakan pelimpahan otoritas dan kekuasaan dari pusat ke daerah yang kemudian dapat menjalankan pemerintahannya sendiri (daerah otonom). Menurut Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, "Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah".

Dinas perhubungan merupakan sebuah unit kerja yang mempunyai peran dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam implementasinya, masyarakat sering kali hanya mengetahui tindakan teknis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan seperti mengatur kegiatan lalu lintas, penggantian lampu *traffic light*, pemasangan rambu lalu lintas, menilang angkutan umum yang melanggar peraturan (pemungutan retribusi), atau kegiatan teknis lapangan lainnya (Riyadi, 2022).

Dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pengelolaan lahan parkir, Dinas Perhubungan berperan sebagai regulator, pengawas, dan fasilitator terkait hal-hal teknis yang ada di dermaga. Sebagai regulator, Dinas Perhubungan bertanggung jawab dalam membuat peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan lahan parkir termasuk penetapan standar dan persyaratan teknis untuk pengelolaan lahan parkir seperti ukuran lahan parkir, fasilitas yang harus ada, dan sistem pembayaran.

Sebagai pengawas, Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk memeriksa kondisi lahan parkir dan pelayanan yang diberikan. Sebagai fasilitator Dinas Perhubungan sebagai koordinator antara berbagai pihak terkait pengelolaan parkir, seperti pemerintah daerah dan masyarakat.

Permasalahan yang terjadi menyangkut tentang keterbatasan lahan parkir terhadap jumlah kendaraan yang ingin parkir di dermaga desa Jongkong, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu. Mobil pribadi masyarakat setempat yang parkir di dermaga tersebut, mengakibatkan kurangnya lahan parkir untuk kendaraan truk angkutan barang sehingga sopir truk angkutan barang memilih memarkirkan kendaraannya di tepi jalan di sekitar dermaga.

Masyarakat setempat yang mempunyai mobil tidak memiliki garasi atau tempat parkir disekitar rumahnya, sehingga mereka memilih dermaga sebagai tempat

parkir kendaraannya. Hal tersebut mengakibatkan kepadatan parkir dan kemacetan terjadi di area sekitar dermaga.

Gambar 1.1

Kendaraan pribadi masyarakat di parkiran dermaga



Sumber : peneliti 2024

Rata-rata kendaraan truk barang yang berada di desa Jongkong merupakan kendaraan lintas wilayah dengan rute Pontianak-Jongkong yang membawa muatan barang untuk toko-toko swalayan yang ada di desa Jongkong. Pola kedatangan truk angkutan barang dalam sebulan tidak menentu karena truk-truk yang datang membawa kebutuhan toko swalayan, sehingga mereka memerlukan ruang untuk bongkar muat dan parkir sementara, sehingga hal ini menambah tekanan pada lahan parkir yang terbatas.

Pada jam 10:00 sampai jam 15:00, kendaraan truk barang datang ke parkiran dermaga yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bongkar muat barang. Pada jam-jam ini lahan parkir sering *overload* atau kelebihan daya tampung karena mobil pribadi masyarakat yang mendominasi lahan parkir di dermaga tersebut.

Berdasarkan pra-observasi yang dilakukan peneliti yaitu wawancara dengan pegawai Dinas Perhubungan bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (ASDP), daya tampung yang dimiliki oleh dermaga di desa Jongkong yaitu berjumlah 50 kendaraan. Namun, puncak dari kepadatan parkir yang terjadi berjumlah 130 kendaraan. Adanya faktor pada saat hari tertentu seperti faktor musiman dan hari besar memperparah situasi yang ada di dermaga desa Jongkong.

Pada faktor musiman contohnya pada musim buah, kedatangan pedagang dan pembeli buah dalam jumlah besar berkontribusi pada lonjakan kebutuhan parkir. Demikian pula pada hari besar seperti hari raya, volume mobil pribadi masyarakat dan truk angkutan barang cenderung meningkat signifikan seiring dengan aktivitas jual beli masyarakat yang lebih tinggi.

Puncak kepadatan yang mencapai 130 kendaraan pada momen-momen tersebut menunjukkan adanya kombinasi antara aktivitas rutin pengiriman barang dan lonjakan musiman atau perayaan yang secara periodik melampaui kapasitas normal lahan parkir dermaga. Selain itu, lokasi pasar yang berada di sekitar area dermaga membuat aktivitas jual beli yang dilakukan masyarakat di pasar menjadi terganggu.

Keterbatasan lahan parkir di dermaga menjadi masalah yang kompleks, terutama karena lokasi lahan parkir dermaga yang berada di pusat perekonomian di desa Jongkong. Keberadaan toko dagangan yang dibangun masyarakat di sekitar area dermaga menyebabkan rencana perluasan lahan parkir yang diajukan oleh Dinas Perhubungan mendapat penolakan dari masyarakat.

Masyarakat yang telah lama berdagang di area tersebut merasa khawatir kehilangan mata pencaharian jika toko dagangan mereka di relokasi. Di sisi lain,

perluasan lahan parkir sangat penting untuk mengatasi kepadatan parkir kendaraan dan kemacetan di area sekitar dermaga.

Meningkatnya aktivitas ekonomi di desa Jongkong juga menjadi penyebab kepadatan lahan parkir di dermaga tersebut. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah kendaraan semakin tinggi sehingga hal tersebut memungkinkan lebih banyak orang untuk memiliki kendaraan pribadi, termasuk kendaraan mobil. Namun peningkatan jumlah kendaraaan ini tidak sesuai dengan ketersediaan lahan parkir yang ada karena masyarakat tidak memiliki garasi atau tempat parkir di sekitar rumahnya, sehingga mereka memilih dermaga sebagai tempat parkir kendaraan mereka.

Pertumbuhan ekonomi di desa Jongkong mendorong munculnya usaha perdagangan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kapuas Hulu, desa Jongkong memiliki usaha perdagangan yang terus bertambah dari tahun ke tahun berdasarkan perkembangan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) di Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu. Usaha perdagangan yang tercatat dari tahun 2006 sampai tahun 2019 berjumlah sebanyak 36 usaha perdagangan.

Gambar 1.2.

Tabel / *Table : 7.1.2.*
PERKEMBANGAN SITU / SIUP DI KECAMATAN JONGKONG
TAHUN 2006 – 2019

NO	DESA	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Temenang	-	-	-	-	-	-
02	Jongkong Kanan	-	-	-	-	-	-
03	Jongkong Pasar	15	17	20	20	22	25
04	Jongkong Kiri Hilir	11	-	-	-	-	1
05	Jongkong Kiri Hulu	1	1	1	1	1	1
06	Ujung Said	-	-	-	-	-	-
07	Ujung Bambu	-	-	-	-	-	-
08	Bontai	-	-	-	-	-	-
09	Jongkong Kiri Tengah	-	-	-	-	-	-
10	Jongkong Tanjung	-	-	-	-	-	7
11	Kandung Suli	-	-	-	-	-	-
12	Penepian Raya	-	-	-	-	-	-
13	Karya Baru	-	-	-	-	-	-
14	Nanga Serian	-	-	-	-	1	2
	Jumlah	18	18	21	21	24	36

Sumber : Kasi Ekbang Kec. Jongkong

Sumber : Kecamatan Jongkong Dalam Angka 2021

Banyaknya keberadaan usaha perdagangan pada gambar 1.2. dapat menjelaskan bagaimana desa Jongkong menjadi pusat ekonomi di Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini juga berdampak pada banyaknya *volume* kendaraan yang semakin bertambah. Hal tersebut menambah kepadatan lahan parkir di dermaga yang menyebabkan kemacetan bahkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Masalah ini memerlukan perhatian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu melihat banyaknya pengguna jalan yang masih kurang mentaati ketertiban berlalu lintas.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan melaksanakan fungsi dalam mengatur lalu lintas dan kendaraan, termasuk pengelolaan lahan parkir di dermaga berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan memiliki wewenang dalam mengelola lahan parkir dan memungut retribusi parkir pada kendaraan yang menggunakan lahan parkir di dermaga desa Jongkong.

Dalam hal ini, Dinas Perhubungan di bidang ASDP bertanggung jawab dalam mengelola dermaga yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk dermaga di desa Jongkong. Terkait hasil pendapatan dari retribusi parkir, Dinas Perhubungan berperan sebagai fasilitator dalam pemungutan retribusi parkir dan melakukan penyetoran melalui bendahara penerima ke kas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam mengelola lahan parkir di dermaga desa Jongkong, Dinas Perhubungan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melakukan pengelolaan secara

langsung, seperti penataan parkir kendaraan, pengaturan arus lalu lintas, penegakan aturan parkir, dan pengelolaan retribusi. UPT melakukan pemantauan dan pengelolaan di dermaga secara langsung untuk mengatur aktivitas di area dermaga, seperti parkir kendaraan area darat dan air maupun arus lalu lintas seperti keluar masuknya kendaraan di area dermaga.

Sehubungan dengan banyaknya mobil pribadi masyarakat yang parkir di dermaga, Dinas Perhubungan memungut retribusi pada kendaraan yang menggunakan lahan parkir di dermaga tersebut. Retribusi adalah pungutan biaya atas suatu jasa atau penggunaan fasilitas tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konteks parkir di dermaga, retribusi merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa parkir.

Dasar peraturan yang digunakan Dinas Perhubungan terkait pemungutan retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini berisi tentang jenis pajak dan jenis retribusi yang dikenakan di Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk pemungutan retribusi parkir dan tarif yang dikenakan pada kendaraan yang parkir diluar area yang ditentukan pemerintah.

Pemungutan retribusi parkir dikenakan pada mobil pribadi masyarakat setempat yang parkir di dermaga, sedangkan tarif yang dikenakan pada mobil pribadi masyarakat berdasarkan jenis kendaraan dan tingkat kepadatan jalan atau parkir. Penarikan retribusi melibatkan UPT dermaga desa Jongkong untuk memungut retribusi parkir. Proses penarikan retribusi dilakukan dengan memberikan karcis parkir sebagai bukti pembayaran.

Tabel 1.1.

Tarif Retribusi Kendaraan

Jenis Kendaraan	Tingkat Kepadatan Jalan	Satuan	Tarif (Rp.)
Truk angkutan barang	Tinggi	Per Sekali Parkir	12.500,-
	Sedang	Per Sekali Parkir	10.000,-
	Rendah	Per Sekali Parkir	7.500,-
Sedan, Jeep, Minibus, Pick up dan sejenisnya	Tinggi	Per Sekali Parkir	5.000,-
	Sedang	Per Sekali Parkir	4.000,-
	Rendah	Per Sekali Parkir	3.000,-

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan pra-observasi yang dilakukan di lapangan, Dinas Perhubungan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemungutan retribusi parkir kendaraan. SOP ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemungutan retribusi parkir yang teratur, transparan, dan akuntabel di area dermaga desa Jongkong. Tujuannya adalah memastikan proses pemungutan retribusi berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. SOP yang dibuat oleh Dinas Perhubungan dilaksanakan oleh UPT dermaga desa Jongkong sebagai petugas yang melakukan pengelolaan dermaga secara langsung. SOP yang digunakan dalam memungut retribusi parkir adalah sebagai berikut :

1. Penetapan tarif dan lokasi parkir. Dinas Perhubungan menetapkan tarif dan lokasi parkir, sehingga UPT dermaga melakukan pemungutan sesuai yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.

2. Pemungutan retribusi, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pengendara yang dikenakan retribusi kepada petugas pelaksana.
3. Pengawasan, yaitu UPT dermaga Jongkong melakukan pemantauan terhadap situasi yang ada di lapangan.
4. Pelaporan, yaitu UPT dermaga Jongkong membuat laporan bulanan mengenai jumlah kendaraan yang parkir, jumlah retribusi yang terkumpul, dan kendala yang dihadapi.
5. Penyetoran pendapatan, yaitu pendapatan retribusi parkir yang disetorkan melalui bendahara penerima Dinas Perhubungan ke kas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Evaluasi berkala, yaitu UPT dermaga Jongkong dan Dinas Perhubungan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi.

Tujuan dari retribusi parkir yang dikenakan pada kendaraan mobil masyarakat setempat adalah untuk mendorong penyediaan lahan parkir agar dapat mengurangi jumlah kendaraan yang parkir sembarangan dan mengatur penggunaan lahan parkir. Hal ini dapat meminimalisir timbulnya kepadatan parkir kendaraan dan kemacetan di area sekitar dermaga, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat membiayai pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan lahan parkir.

Sehubungan dengan pengelolaan lahan parkir dermaga yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan surat persetujuan hibah barang milik daerah tahun 2023. Terdapat 5 hibah barang (dermaga) milik pemerintah provinsi Kalimantan

Barat yang salah satunya adalah dermaga desa Jongkong, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini membuat segala fasilitas dan lahan yang ada di dermaga menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pengelolaan lahan parkir yang efektif diharapkan dapat mengatasi masalah kepadatan parkir dan kemacetan di area dermaga dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi pengguna jasa parkir. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu perlu membuat strategi sebagai upaya mengatasi masalah kepadatan parkir untuk menciptakan lalu lintas yang lebih lancar, aman, dan tertib.

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas, maka peneliti tertarik pada permasalahan ini dengan mengambil judul pada penelitian ini yakni “Fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Lahan Parkir di Dermaga Desa Jongkong Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu”.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis mengidentifikasi masalah yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perencanaan terkait keterbatasan lahan parkir di dermaga desa Jongkong.
2. Belum optimalnya pengorganisasian di Unit Pelaksana Teknis.
3. Belum optimalnya penggunaan sumber daya dalam mendukung operasional dermaga.
4. Belum optimalnya pengawasan yang diterapkan terkait pengelolaan lahan parkir.

1.3. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang, fokus penelitian membahas tentang efektivitas fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan lahan parkir di dermaga desa Jongkong, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana fungsi Dinas Perhubungan dalam mengelola lahan parkir terhadap keterbatasan lahan di dermaga desa Jongkong, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan peneliti sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan lahan parkir yang efektif terhadap kondisi keterbatasan lahan di dermaga desa Jongkong, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam konteks kebijakan transportasi dan perencanaan tata ruang. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan transportasi yang lebih efektif.

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki berbagai manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Dinas Perhubungan

   Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi konkret kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu mengenai kebijakan yang diterapkan dalam mengelola lahan parkir di dermaga untuk mengurangi kepadatan parkir dan kemacetan. Dinas Perhubungan dapat menggunakan hasil penelitian untuk menyusun rencana aksi yang lebih terarah.

2. Instansi terkait

   Hasil penelitian dapat memberikan informasi yang secara komprehensif dan menjadi dasar dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan retribusi. Instansi terkait dalam penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah yang menjadi pengelola pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah dapat menganalisis kebijakan yang ada, mengidentifikasi kelemahan, dan merumuskan rekomendasi perbaikan.

3. Masyarakat

   Penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana kebijakan terkait transportasi, khususnya dalam pengaturan kendaraan dan pengelolaan lahan parkir dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat seperti mengurangi kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas.

4. Transportasi

   Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur jalan dan pengelolaan lahan parkir untuk mengurangi kemacetan.

5. Peneliti lain

   Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti lain untuk menambah referensi wawasan yang memiliki relevansi khususnya bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan.